

ABSTRAK

Di abad ke-21 banyak aktivitas yang menggunakan internet dan komputer. Aktivitas tersebut ditransformasikan ke dalam *cyberspace*. Selain aktivitas individu, aktivitas pemerintahan dalam kehidupan bernegara juga banyak ditransformasikan ke dalam *cyberspace*. Dalam perkembangannya, negara menyalahgunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan politik mereka dengan saling mengakses aktivitas pemerintahan negara lain di dalam *cyberspace* secara illegal. Kegiatan tersebut disebut *cyber warfare*. *Cyber warfare* menciptakan suatu keadaan baru di dalam kehidupan bernegara, dimana negara saling menghormati kedaulatan negara lain di *real space*, namun di *cyberspace* negara melakukan tindakan serang-menyerang terhadap fasilitas pemerintah seperti mencuri informasi, menyebarkan informasi kegiatan suatu negara yang memiliki efek domino dalam pemerintahan negara tersebut. Secara gramatikal *cyber warfare* dapat diartikan sebagai perang di dalam *cyberspace*, namun *cyber warfare* tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan perang konvensional karena domain *cyber warfare* dan perang konvensional berbeda. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, *cyber warfare* semakin banyak terjadi, namun belum ada konvensi internasional yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum untuk mengatur *cyber warfare* tersebut. Perlu ditentukan kedudukan *cyber warfare* di dalam hukum internasional sehingga dapat diketahui dasar hukum yang tepat untuk mengatur *cyber warfare*.

Kata Kunci : *cyber warfare*, perang, hukum internasional, hukum humaniter, kedaulatan.